

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis pangan di Yaman merupakan salah satu bencana kemanusiaan paling kompleks dan mendesak di dunia. Konflik bersenjata yang berkepanjangan sejak tahun 2015 telah menghancurkan infrastruktur publik, menghambat jalur distribusi pangan, dan memperparah krisis ekonomi yang sudah berlangsung lama. Dampak dari perang ini menyebabkan harga pangan meningkat tajam, mata uang nasional terdepresiasi, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar menjadi sangat terbatas. Akibatnya, jutaan penduduk Yaman menghadapi krisis pangan akut yang berdampak langsung terhadap status gizi, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas, dan pengungsi internal (WFP, 2023).

Kondisi ini menjadikan Yaman sebagai salah satu negara dengan tingkat ketergantungan bantuan pangan tertinggi di dunia, yang berimplikasi besar terhadap stabilitas sosial dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena kompleksitas tersebut, pemilihan Yaman sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa negara ini merupakan salah satu kasus paling kompleks dalam krisis pangan global, dimana konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik secara langsung berdampak terhadap ketahanan pangan nasional. Selain itu, Yaman juga menjadi salah satu negara dengan operasi kemanusiaan terbesar *World Food Programme* (WFP) di dunia, sehingga

memberikan konteks empiris yang kaya untuk menganalisis efektivitas implementasi program organisasi internasional dalam situasi darurat.

WFP telah beroperasi di Yaman sejak tahun 1967 melalui berbagai inisiatif kemanusiaan dan pembangunan ketahanan pangan. Selama lebih dari lima dekade, WFP menjadi lembaga utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani distribusi bantuan pangan dan penguatan kapasitas masyarakat di wilayah yang terdampak konflik dan bencana. Namun, pecahnya perang sipil sejak 2015 membuat banyak program kehilangan efektivitas karena blokade, keterbatasan logistik, dan ketidakstabilan politik. Akibatnya, pada periode 2022-2024 WFP melakukan pembaruan strategi implementasi untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas intervensi di lapangan.

Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Penduduk pada IPC Fase 3+ di Negara Krisis Pangan Utama (2020-2024)

Negara	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Yaman	±16,2 juta	±16,1 juta	17,0 juta	±16,9 juta	15,6 juta
Somalia	±5,6 juta	±6,7 juta	±7,1 juta	±6,6 juta	±6,5 juta
Sudan Selatan	±6,5 juta	±7,2 juta	±7,7 juta	±7,8 juta	±7,1 juta
Ethiopia	±8,6 juta	±9,4 juta	±10,2 juta	±9,1 juta	±8,3 juta

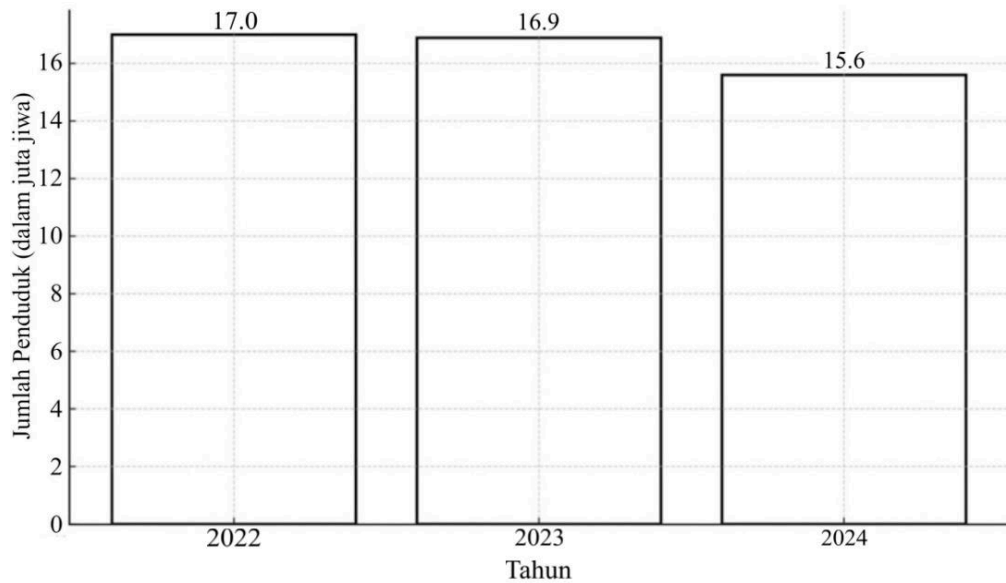
Sumber: *Integrated Food Security Phase Classification (IPC), Global & Country Reports 2020-2024*

Berdasarkan analisis *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC), Yaman secara konsisten termasuk dalam negara dengan jumlah penduduk tertinggi yang mengalami krisis pangan akut (IPC *Fase* 3 atau lebih buruk) selama periode 2020-2024. Jumlah penduduk Yaman yang terdampak krisis pangan berada di kisaran 15-17 juta jiwa setiap tahunnya, angka yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan negara krisis lain seperti Somalia dan Sudan Selatan, serta relatif sebanding namun lebih kronis dibandingkan Ethiopia. Perbandingan lintas negara ini menunjukkan bahwa krisis pangan di Yaman tidak bersifat temporer, melainkan struktural dan berkepanjangan akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung, fragmentasi otoritas politik, serta gangguan sistem distribusi pangan nasional.

Karakteristik krisis yang kronis dan berskala besar tersebut menjadikan Yaman sebagai kasus yang relevan untuk dianalisis, khususnya dalam mengkaji implementasi program WFP dalam situasi konflik berkepanjangan. Menurut *WFP Yemen Annual Country Report 2022*, sekitar 17 juta orang di Yaman mengalami krisis pangan akut, sementara 23,4 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan. Situasi ini sedikit membaik pada tahun 2023 dengan 16,9 juta orang menghadapi krisis pangan akut, meskipun sebagian program harus dihentikan sementara akibat krisis pendanaan sebesar USD 1,66 miliar. Tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan penurunan jumlah penduduk yang menghadapi krisis pangan menjadi 15,6 juta jiwa, seiring meningkatnya impor bahan bakar dan turunnya harga gandum global (WFP, 2022-2024).

Dalam menjalankan misinya, WFP mengimplementasikan enam program utama, yaitu *General Food Assistance (GFA)*, *Cash Assistance Programme (CAP)*, *Nutrition Programme*, *School Feeding Programme*, *Livelihoods and Resilience Programme*, serta *Enabling Services & Humanitarian Logistics* (WFP, 2022). Keenam program tersebut mencerminkan bahwa peran WFP di Yaman tidak hanya berfokus pada bantuan pangan jangka pendek, tetapi juga pada upaya membangun ketahanan pangan jangka panjang dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Tren penurunan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan dalam tiga tahun terakhir menggambarkan hasil nyata dari intervensi kemanusiaan yang dijalankan WFP dan mitra internasionalnya. Namun, pencapaian tersebut masih bersifat rapuh karena ketergantungan terhadap bantuan eksternal tetap tinggi dan kondisi politik maupun ekonomi nasional belum stabil sepenuhnya. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi program WFP di Yaman periode 2022-2024 menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas pembaruan strategi yang telah dilakukan, sekaligus merumuskan pendekatan kolaboratif yang lebih inklusif dalam mendukung pencapaian Ketahanan Pangan (United Nations, 2015).



Gambar 1.1. Tren Penurunan Jumlah Penduduk dengan Krisis Pangan Akut di Yaman 2022-2024

Sumber: *World Food Programme Yemen Annual Country Reports 2022-2024*

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan hasil dari berbagai studi terdahulu yang relevan mengenai peran dan implementasi WFP dalam menangani krisis pangan. Kajian literatur ini dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama membahas penelitian yang menyoroti peran WFP dalam mengatasi krisis pangan di berbagai negara, sedangkan bagian kedua meninjau implementasi program WFP, khususnya terkait efektivitas serta tantangan pelaksanaannya.

Dalam peran WFP, Zada (2022) dalam penelitiannya berjudul “*The Role of the World Food Programme in Addressing Food Insecurity in Yemen*” menjelaskan bahwa di Yaman, WFP berkontribusi besar melalui bantuan pangan darurat, *cash-based transfer*, dan program peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Meski berhasil menjangkau banyak penerima manfaat,

pelaksanaannya tetap dihadapkan pada keterbatasan dana, hambatan distribusi akibat konflik, dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan (Zada, 2022).

Sementara itu, penelitian Makumbe, Linganiso, dan Karodia (2014) berjudul *“An Evaluation of World Food Programme Emergency Aid Delivery Modalities in Zimbabwe”* menemukan bahwa di Zimbabwe, WFP tidak hanya menjalankan bantuan darurat, tetapi juga mengoptimalkan berbagai modalitas bantuan seperti bantuan pangan langsung, *voucher*, dan bantuan tunai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan tunai cenderung lebih efisien dan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi rumah tangga penerima, meskipun tantangan akses pasar serta perbedaan harga pangan antar wilayah tetap mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya (Makumbe et al., 2014).

Selanjutnya, dalam kajian implementasi organisasi internasional, Barbelet (2018) melalui penelitiannya *“As Local as Possible, as International as Necessary: Understanding Capacity and Complementarity in Humanitarian Action”* menekankan pentingnya kolaborasi antara aktor internasional dan lokal dalam operasi kemanusiaan, termasuk dalam konteks WFP. Barbelet menyoroti bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kapasitas mitra lokal, koordinasi lintas aktor, serta kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan dinamika konflik dan tantangan struktural di lapangan. Temuan ini relevan untuk memahami bagaimana WFP menghadapi kendala akses, logistik, dan hambatan birokrasi dalam penyaluran bantuan di Yaman (Barbelet, 2018).

Di sisi lain, Gentilini et al. (2020) dalam penelitian berjudul *“Cash Transfers and Food Assistance in Humanitarian Contexts: Lessons from the World*

Food Programme's Experience in Yemen” menunjukkan bahwa program bantuan tunai (*cash transfer*) WFP di Yaman lebih fleksibel dan sering kali lebih efektif dalam meningkatkan akses pangan dibanding bantuan pangan langsung. Selain memperkuat daya beli masyarakat, bantuan tunai juga mendorong aktivitas ekonomi lokal. Namun demikian, penelitian ini menekankan perlunya pengawasan dan desain program yang matang agar bantuan tunai tetap berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan (Gentilini et al., 2020).

Masih terdapat keterbatasan dalam penelitian sebelumnya, karena sebagian besar studi berfokus pada periode sebelum 2020 atau hanya menyoroti aspek tertentu seperti bantuan tunai atau koordinasi dengan aktor lokal. Hingga kini, kajian yang membahas implementasi WFP secara menyeluruh dalam dinamika krisis Yaman setelah 2022 masih jarang ditemukan. Meskipun demikian, temuan dari keempat penelitian terdahulu tetap menjadi dasar penting bagi studi ini dalam menganalisis implementasi WFP di Yaman periode 2022-2024, khususnya terkait efektivitas, tantangan operasional, dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimana implementasi program *United Nations World Food Programme* dalam mencapai ketahanan pangan di Yaman, pada periode 2022-2024?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi mahasiswa program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program *United Nations World Food Programme* (UN WFP) dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan di Yaman pada tahun 2022-2024.

1.4 Kerangka Teori/Konsep

Kerangka teori dalam penelitian ini terdiri dari beberapa konsep kunci yang berfungsi untuk memahami dinamika kerja sama internasional dalam meningkatkan ketahanan pangan di negara berkembang.

1.4.1 Implementasi Organisasi Internasional

Teori implementasi organisasi internasional dari Jutta Joachim, Bob Reinalda, dan Bertjan Verbeek menjelaskan bagaimana organisasi internasional mengubah kebijakan global menjadi tindakan konkret. Teori ini berangkat dari dinamika yang muncul setelah berakhirnya Perang Dingin dan era globalisasi, yang mendorong pembentukan organisasi internasional sebagai aktor penting dalam tata kelola global. Implementasi dalam konteks ini melibatkan langkah nyata, seperti penerapan regulasi,

pembentukan institusi, dan pengesahan kebijakan atau undang-undang di tingkat nasional maupun internasional. Dalam teori ini, Joachim, Reinalda, dan Verbeek juga mengidentifikasi tiga pendekatan utama yang digunakan organisasi internasional dalam implementasi kebijakan: *enforcement*, *management*, dan *normative* (Joachim et al., 2008).

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
Resources	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports • <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports • <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Authority and legitimacy</i>

Gambar 1.2. Tiga Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional
Sumber : Joachim et al., 2008

Pendekatan *enforcement* berfokus pada penerapan sanksi atau insentif untuk memastikan kepatuhan negara anggota terhadap kebijakan atau kesepakatan internasional. Dalam pendekatan ini, pengawasan dilakukan melalui mekanisme laporan berkala, inspeksi, atau audit untuk memonitor kepatuhan negara terhadap aturan yang disepakati. Ketika pelanggaran terjadi, organisasi dapat memberikan sanksi berupa denda atau pembatasan akses sumber daya. Sebaliknya, insentif seperti bantuan

teknis atau penghapusan utang diberikan untuk mendorong kepatuhan. Pendekatan *enforcement* ini mencakup dua kategori utama.

Pertama, *naming and shaming*, yaitu strategi yang berfokus pada penilaian dan publikasi terhadap perilaku negara berdasarkan laporan resmi, komite ahli, inspeksi lapangan, atau laporan dari organisasi non-pemerintah (NGO). Tujuannya adalah memberikan tekanan moral dan reputasional kepada negara yang tidak patuh melalui eksposur publik. Kedua, *sanctions*, yaitu penerapan hukuman yang lebih konkret seperti sanksi ekonomi, militer, ajudikasi melalui lembaga hukum internasional, atau penalti finansial. Kedua mekanisme ini digunakan untuk menegakkan norma dan memastikan bahwa negara anggota mematuhi aturan yang telah disepakati (Joachim et al., 2008).

Pendekatan *management* menitikberatkan pada fungsi pengelolaan dan koordinasi, di mana organisasi internasional bertindak sebagai fasilitator bagi negara anggota dalam mencapai tujuan kebijakan global. Fokus utama pendekatan ini bukan pada pemaksaan kepatuhan, melainkan pada pemberian dukungan teknis, koordinasi antar aktor, serta peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat nasional. Dalam pelaksanaannya, pendekatan *management* mencakup tiga kategori utama, yaitu *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving*. Kategori *monitoring* berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di tingkat nasional melalui pengumpulan data, analisis hasil, dan pelaporan kemajuan (Joachim et al., 2008). Proses ini tidak hanya memastikan

transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis yang berbasis bukti.

Kategori *capacity building* berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, kelembagaan, dan sumber daya manusia di negara anggota melalui pelatihan, transfer teknologi, pendampingan teknis, serta dukungan pendanaan guna memperkuat kapasitas nasional agar mampu mengelola program secara mandiri dan berkelanjutan (Joachim et al., 2008). Sementara itu, kategori *problem solving* berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan implementatif yang muncul selama pelaksanaan program. Dalam konteks ini, organisasi internasional bertindak sebagai mediator dan penyelesain masalah melalui koordinasi lintas lembaga, adaptasi kebijakan, serta inovasi *management* di lapangan. Tujuannya adalah memastikan hambatan operasional, baik teknis maupun struktural, dapat diselesaikan secara kooperatif tanpa mengorbankan prinsip efektivitas dan keberlanjutan program (Joachim et al., 2008).

Pendekatan *normative* berfokus pada penyebaran nilai atau norma global untuk mempengaruhi perilaku negara anggota tanpa paksaan. Organisasi internasional berperan sebagai agen perubahan dengan membentuk standar global, seperti prinsip ketahanan pangan berkelanjutan atau hak atas pangan (Joachim et al., 2008). Dalam pendekatan ini, *authority* dan *legitimacy* menjadi kunci. *Authority* menunjukkan kapasitas organisasi internasional untuk mempengaruhi negara melalui keahlian dan otoritas moral, sedangkan *legitimacy* mencerminkan sejauh mana

pengaruh tersebut diterima sebagai sah oleh negara anggota. Kombinasi keduanya memungkinkan organisasi menanamkan norma baru tanpa menggunakan paksaan (Joachim et al., 2008).

Dari ketiga pendekatan tersebut, penulis menggunakan pendekatan *management* dan *normative*. Pendekatan *management* dipilih karena fokusnya pada pengelolaan dan koordinasi melalui pengawasan dan pemberian dukungan teknis, yang relevan dalam mendorong pencapaian kebijakan internasional secara efisien dan efektif. Pendekatan *normative* juga dipilih karena kemampuannya menyebarkan norma dan nilai global, yang penting dalam membentuk pola perilaku negara anggota menuju standar internasional. Sementara itu, pendekatan *enforcement* tidak digunakan karena penelitian ini tidak menekankan pada aspek pemaksaan atau pemberlakuan sanksi untuk memastikan kepatuhan negara anggota terhadap perjanjian internasional (Joachim et al., 2008).

Pendekatan ini lebih relevan dalam konteks organisasi internasional yang memiliki otoritas hukum formal untuk menegakkan kepatuhan, seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dapat menjatuhkan sanksi ekonomi maupun militer terhadap negara yang melanggar hukum internasional (United Nations, 2023). Berbeda halnya dengan *United Nations World Food Programme* (UN WFP) yang berperan sebagai badan pelaksana di bawah sistem PBB dengan mandat kemanusiaan, bukan lembaga normatif yang memiliki kekuatan hukum untuk memaksa negara anggota. WFP bekerja melalui

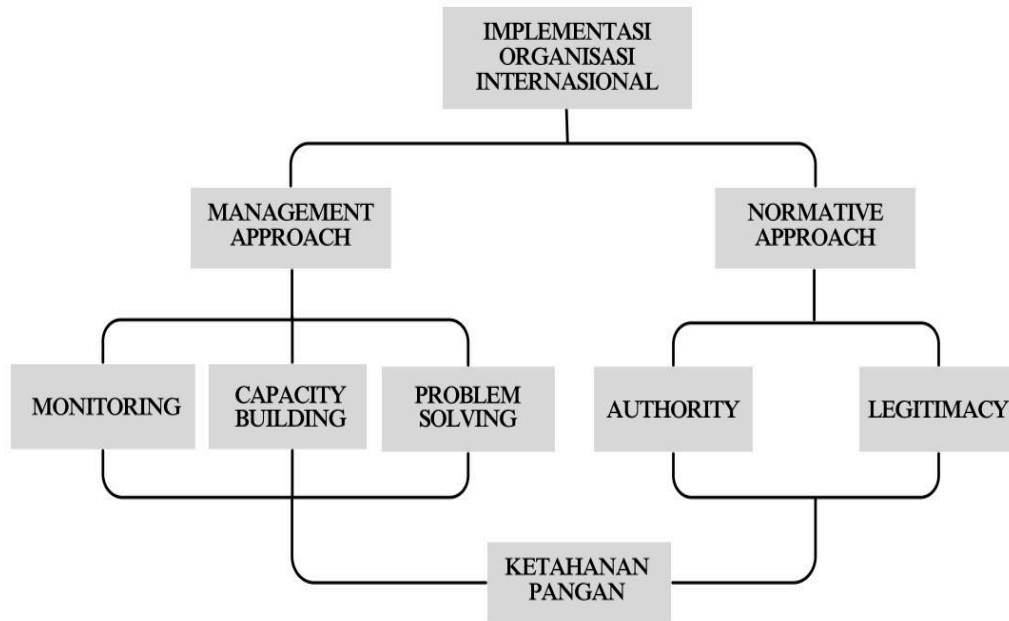
mekanisme koordinasi, kemitraan, dan persuasi kebijakan (*policy persuasion*) dengan pemerintah nasional dan lembaga donor untuk mencapai tujuan ketahanan pangan global (WFP, 2024).

1.4.2 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara atau komunitas untuk memastikan akses yang cukup, aman, dan bergizi terhadap makanan bagi semua individu tanpa terkecuali. Konsep ini tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga memperhatikan aksesibilitas dan pemanfaatan pangan secara adil. Amartya Sen, seorang ekonom terkemuka, menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi pangan, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap makanan (Sen, 1981). Sen berpendapat bahwa distribusi yang adil, penghapusan kemiskinan, dan pengurangan ketidakadilan sosial menjadi kunci untuk menciptakan sistem pangan yang inklusif (Sen, 1981).

Ketahanan pangan memainkan peran penting dalam pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDG), terutama SDG 2 (*Zero Hunger*), yang secara langsung bertujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi. Dengan memenuhi kebutuhan dasar akan makanan bergizi, ketahanan pangan juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus memperkuat ketahanan sistem sosial dan ekonomi (Sen, 1981).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.3. Sintesa Pemikiran

Sumber : Elaborasi Penulis

Berdasarkan sintesa pemikiran pada bagan di atas, implementasi organisasi internasional, dalam hal ini *World Food Programme* (WFP) dalam mewujudkan ketahanan pangan di Yaman dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu *management approach* dan *normative approach*. Melalui *management approach*, WFP menjalankan tiga tahapan yang saling berkaitan yaitu *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving*. *Monitoring* digunakan untuk menilai efektivitas program, hasilnya kemudian menjadi dasar *capacity building* dalam memperkuat kemampuan mitra lokal, dan *problem solving* dilakukan untuk mengatasi hambatan melalui koordinasi dan inovasi.

Ketiga proses ini mendukung tercapainya ketahanan pangan secara efektif. Sementara itu, dalam *normative approach*, *authority* dan *legitimacy* menjadi kunci. *Authority* menunjukkan kapasitas organisasi internasional dalam mempengaruhi negara melalui keahlian dan otoritas moral, sedangkan *legitimacy* mencerminkan sejauh mana pengaruh tersebut diterima sebagai sah oleh negara anggota. Pendekatan ini memperkuat aspek kemanusiaan dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan WFP. Dengan demikian, bagan tersebut menggambarkan keterpaduan antara *management approach* yang bersifat operasional dan *normative approach* yang bersifat nilai dalam mewujudkan ketahanan pangan di Yaman.

1.6 Argumen Utama

Ketahanan pangan di Yaman menjadi isu yang mendesak akibat konflik berkepanjangan sejak 2015 yang menyebabkan kerusakan infrastruktur, menurunnya produksi pertanian, serta terbatasnya akses pangan bagi masyarakat. Dalam merespons situasi tersebut, WFP menerapkan dua pendekatan utama, yaitu *management approach* dan *normative approach*, untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan. Melalui *management approach*, pelaksanaan program WFP dijalankan dalam tiga kategori utama. Pertama, *monitoring*, yang mencakup penerapan *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC), *Augmented Assurance Plan*, serta sistem *post-distribution monitoring* (PDM) guna memastikan efektivitas, transparansi, dan akurasi data penerima bantuan. Kedua, *capacity building*, yang diwujudkan melalui program seperti *Livelihoods and Resilience Programme*, *School Feeding Programme*, dan *Nutrition Programme*

yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta penguatan sistem pelayanan gizi lokal.

Ketiga, *problem solving*, yang dilakukan dengan menyesuaikan strategi implementasi terhadap kondisi lapangan, seperti peluncuran *Targeted Emergency Food Assistance* (TEFA) sebagai adaptasi dari GFA, perluasan *Cash Assistance Programme* di wilayah perkotaan, serta pengoperasian *UN Humanitarian Air Service* (UNHAS) dalam mendukung distribusi bantuan ke daerah sulit dijangkau. Sementara itu, melalui *normative approach*, WFP berfokus pada penyebaran nilai dan norma global untuk mempengaruhi perilaku negara tanpa paksaan. Pendekatan ini didasarkan pada dua kategori utama, yaitu *authority* dan *legitimacy*. *Authority* menunjukkan kapasitas WFP untuk mempengaruhi kebijakan pangan nasional melalui keahlian teknis, data, dan otoritas moralnya sebagai lembaga kemanusiaan internasional. Sementara *legitimacy* tercermin dari penerimaan pemerintah Yaman terhadap standar global yang diperkenalkan WFP, seperti prinsip *right to food*, kesetaraan gender, dan ketahanan pangan berkelanjutan. Melalui legitimasi tersebut, WFP mendorong adopsi norma global ke dalam kebijakan nasional melalui kerja sama teknis dengan organisasi internasional di bidang pangan dan pembangunan.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Nassaji (2015), penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat, sistematis, dan faktual mengenai fenomena atau

situasi tertentu tanpa memanipulasi variabel yang diteliti (Nassaji, 2015). Pendekatan ini berfokus pada “*what exists*” daripada “*why it exists*”, sehingga lebih menekankan pada pemahaman terhadap kondisi nyata dari objek yang diteliti secara mendalam dan kontekstual (Nassaji, 2015).

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memaparkan hubungan antara berbagai aspek yang memengaruhi fenomena tanpa melakukan intervensi langsung terhadapnya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci bagaimana implementasi program WFP di Yaman berlangsung, termasuk strategi pelaksanaannya, bentuk bantuan yang diberikan, serta tantangan yang dihadapi di tengah situasi konflik. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana program tersebut berdampak terhadap ketahanan pangan masyarakat Yaman selama periode 2022-2024.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini difokuskan pada Yaman, dengan perhatian khusus pada wilayah-wilayah yang terdampak paling parah oleh krisis pangan dan menjadi sasaran utama implementasi program-program WFP. Waktu penelitian mencakup periode pelaksanaan program dari tahun 2022 hingga 2024. Jangkauan penelitian pada periode tersebut dipilih karena mencerminkan fase penting dalam implementasi program-program WFP di Yaman, khususnya dalam mendukung pencapaian SDG 2 yang berfokus pada pengentasan kelaparan dan peningkatan ketahanan pangan. Periode 2022-2024 juga dianggap relevan karena menunjukkan perkembangan

signifikan intervensi kemanusiaan WFP, di mana meskipun jumlah penduduk yang terdampak krisis pangan masih tinggi, terdapat tren penurunan kasus krisis pangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program-program tersebut.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode utama berupa studi dokumen untuk memperoleh informasi mendalam dan relevan terkait implementasi program WFP dalam merespons krisis pangan di Yaman. Menurut Bowen (2009), studi dokumen merupakan metode kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasi berbagai dokumen guna memahami konteks dan makna suatu fenomena. Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel melalui analisis terhadap sumber tertulis seperti laporan, kebijakan, dan publikasi resmi (Bowen, 2009).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya, bukan dari hasil pengumpulan langsung di lapangan (Johnston (2017)). Menurut Johnston (2017), data sekunder dapat dimanfaatkan kembali untuk penelitian baru yang relevan, seperti laporan tahunan WFP, publikasi PBB, data *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC), artikel jurnal, dan laporan kebijakan lembaga internasional. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasi bahan pustaka yang relevan sesuai konsep

Zed (2004), sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan program WFP dan kondisi ketahanan pangan di Yaman.

1.7.4 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk mengeksplorasi ide, persepsi, pendapat, dan keyakinan responden yang tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo & Basuki, 2006). Teknik ini berfokus pada pengolahan data dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik, analisis ini mengandalkan interpretasi data secara tekstual untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tema utama. Proses ini memungkinkan peneliti membangun argumen yang koheren serta menjelaskan keterkaitan antar data sehingga dapat merumuskan kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2014).

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari:

BAB I

Bab ini memuat latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori/konsep, sintesis pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian. Dalam bagian metodologi, penulis menjelaskan tipe

penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB II

Bab ini membahas implementasi *World Food Programme* (WFP) di Yaman melalui *normative approach* dengan menekankan dua kategori utama, yaitu *authority* dan *legitimacy*. Selain itu, bab ini juga menyajikan analisis terhadap capaian dan evaluasi efektivitasnya.

BAB III

Bab ini membahas implementasi program *World Food Programme* (WFP) di Yaman dengan menggunakan *management approach* yang berfokus pada tiga kategori, yaitu *monitoring*, *capacity building* dan *problem solving*. Selain itu, bab ini juga menyajikan analisis terhadap capaian program dan evaluasi efektivitasnya, berdasarkan data dan laporan WFP periode 2022-2024.

BAB IV

Bab ini berisi kesimpulan penelitian serta saran yang dapat diambil berdasarkan temuan yang ada.